

Pengaruh Alokasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Perubahan Anggaran Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Brebes pada Masa Pandemi Covid-19

Allocation of Regional Original Income for Changes to the Direct Expenditure Budget of the Brebes Regency Government during the Covid-19 Pandemic

Suci Alfiani¹, Anisa Sains Kharisma², Yenni Ernitawati³, Amelia Sholeha⁴, Nasiruddin⁵
^{1,2,3,4,5}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indonesia
e-mail: ¹sucialfiani50@gmail.com, ²anisasains08@gmail.com, ³yennyernitawati@gmail.com, ⁴amel1134@gmail.com, ⁵herusubagia@gmail.com,

Abstrak

Pada masa pandemic covid-19 seluruh instlasi mengalami dampak yang hebat, tak terkecuali pada anggaran. Tujuan dilakukannya riset ini adalah guna mengetahui besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap perubahan anggaran yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Brebes pada masa pandemi. Metode penelitian menggunakan kualitatif. Sampel penelitian satu unit analisis pada bidang terkait yaitu bidang anggaran di Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Brebes yang diperoleh dengan menggunakan teknik in-depth interview. Hasil riset menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif perubahan anggaran terhadap anggaran belanja langsung pada masa pandemi covid-19 pada Pemerintah Kabupaten Brebes

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Anggaran Belanja, Anggaran Langsung*

Abstract

During the COVID-19 pandemic, all institutions experienced a great impact, including the budget. The purpose of this research is to determine the amount of Regional Original Income (PAD) for budget changes set by the Brebes Regency Government during the pandemic. The research method uses qualitative. The research sample of one unit of analysis in a related field, namely the budget field at the Brebes Regency Office of the Regional Revenue, Financial Management and Assets Agency (BPPKAD) was obtained using in-depth interview techniques. The results showed that there was a positive influence of budget changes on the direct expenditure budget during the Covid-19 pandemic on the Brebes Regency Government

Keywords: *Local Revenue, Budget, Direct Budget*

PENDAHULUAN

Kabupaten Brebes merupakan salah satu area otonom dimana pemerintah daerah menambahkan peluang untuk mengembangkan potensi area dan memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri secara efektif. Kemandirian yang dimiliki daerah otonom bertujuan untuk membangun daerah secara optimal dan tidak berfokus pada anggaran pemerintah pusat sehingga dapat menciptakan kesejahteraan dan mengoptimalkan pendapatan daerah serta memberikan daerah yang termasuk dalam sektor-sektor produktif takaran belanja yang besar. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain asli daerah yang sah merupakan penerimaan yang diperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah melakukan berbagai upaya investasi guna meningkatkan PAD. Peningkatan PAD diharapkan juga dapat meningkatkan belanja modal pemerintah daerah sehingga dapat berdampak positif selama lebih dari satu periode akuntansi

untuk aset tetap dan aset lainnya[1]. Pemerintah daerah mengalokasikan belanja daerahnya untuk melakukan rancangan pembangunan sehingga mampu menambah perkembangan ekonomi, manfaatnya mewujudkan kelancaran semua aktivitas pemerintahan, pemerintah setempat harus megubah komposisi belanjanya[2]

Pemerintah Indonesia dan seluruh rakyat hampir setahun terpenjara oleh ganasnya covid-19 yang seolah menguasai udara di Indonesia. Hal ini menjadi alasan pemerintah mewajibkan penerapan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan menjaga jarak serta menjauhi kerumunan) di tempat umum maupun di rumah[3]. Dampak pandemi covid-19 menyebabkan minimnya pemasukan bagi setiap orang tidak terkecuali anggaran pemerintahan yang semakin minim. Pada perubahan keenam atas peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 90 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Brebes, pasal 1 butir ke-1 Ketentuan dalam Anggaran Pendapatan pada APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 semula sebesar Rp 3.129.412.939.000 berkurang sebesar Rp 216.028.821.33) sehingga menjadi sebesar Rp 2.913.384.117.665. Selanjutnya pada butir ke-2 tentang Ketentuan dalam Anggaran Belanja pada APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 semula sebesar Rp 3.270.994.179.000 berkurang sebesar (Rp 219.970.892.837), sehingga menjadi Rp 3.051.023.283.163. Pada hal ini terlihat jelas masa pandemi mempengaruhi pendapatan maupun anggaran belanja daerah Kabupaten Brebes.

Belanja daerah merupakan tolak ukur keberhasilan otonomi daerah[4]. Dimana dalam APBD belanja modal menjadi bentuk anggaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menambah aset tetap[5]. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang belanja modal, diartikan sebagai pengeluaran anggaran untuk mencapai pendapatan dalam laporan APBD. Perencanaan keuangan dalam jangka panjang berkaitan dengan belanja modal, terutama pada pembiayaan untuk memelihara aset tetap belanja modal yang dihasilkan. Kebutuhan daerah berupa sarana dan prasarana mendasari pengalokasian belanja modal, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas umum. Dari waktu ke waktu, belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang kurang produktif. Belanja modal sebaiknya dialokasikan untuk kepentingan dan tujuan produktif, seperti untuk kegiatan pembangunan[6]. Harapan dari penerimaan pemerintah lebih banyak untuk mewujudkan program pelayanan publik[7]. Menurut pendapat keduanya berharap alokasi belanja untuk kepentingan masyarakat sangat penting. Pada penelitian ini analisis empiris tentang alokasi PAD apakah adanya pengaruh terhadap perubahan anggaran belanja langsung pemkab brebes pada masa pandemi covid-19?. Penelitian ini bertujuan untuk membangun teori dalam alokasi PAD terhadap perubahan anggaran belanja langsung Pemerintah Kabupaten Brebes pada masa pandemi covid-19?

Manfaat penelitian ini bagi akademisi, sebagai bahan masukkan untuk pengembangan ilmu akuntansi sektor publik yang berkaitan tentang alokasi pendapatan asli daerah terhadap perubahan anggaran belanja langsung Pemerintah Kabupaten Brebes pada masa pandemi covid-19. Bagi pemerintah diharapkan adanya pertimbangan akan potensi Pemerintah Kabupaten Brebes dalam mengalokasikan belanja modal pegawai dan mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Brebes, sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik yang semakin baik.

KAJIAN LITERATUR

Anggaran merupakan estimasi kinerja yang akan dicapai pada periode yang telah ditentukan dan dinyatakan dalam ukuran finansial[8]. Rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja, dengan hal ini menggambarkan kondisi keuangan suatu organisasi tertentu yang mencakup informasi tentang pendapatan, aktivitas dan belanja merupakan anggaran publik[9]. Anggaran sektor publik yang terkait dengan jumlah alokasi dana setiap program aktivitas yang diproses dalam satuan moneter. Pembangunan daerah terletak pada kebijakan pembangunan yang khas pada daerahnya dengan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan buatan

yang tersedia oleh daerah tersebut. Pemerintah daerah melakukan kebijakan anggaran, hal ini merupakan kunci keberhasilan dari kebijakan tersebut. Anggaran sektor publik yang terkait dengan jumlah alokasi dana setiap program dan aktivitas yang diproses dalam satuan moneter[10]. Selesainya perumusan strategi dan perencanaan strategi dilakukan secara otomatis proses anggaran organisasi sektor publik dimulai. Penganggaran yang berbasis kinerja bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah, melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah dapat efektif dan efisien[11]. Beberapa fungsi penting terkait anggaran publik antara lain: Hasil akhir dalam proses penyusunan rencana kerja, cetak biru kegiatan yang akan dilakukan di masa depan. Sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan seluruh unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan sebagai alat pengendali unit kerja, sebagai alat motivasi dalam mencapai visi organisasi, instrumen politik. instrumen kebijakan fiskal[12].

Teori pilihan rasional adalah konsep yang memaparkan tentang cara memilih tindakan atau langkah yang maksimal dalam kegunaan atau dalam arti lain untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan guna memaksimalkan keuntungan serta meminimalkan biaya[13]. Teori ini bertumpu pada ilmu ekonomi, namun dalam perkembangannya dapat bermanfaat untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam berbagai disiplin ilmu termasuk bagaimana menjelaskan pilihan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan publik. Seluruh pendapatan daerah yang berasal dari dana pemerintah pusat dan dana yang dihasilkan sendiri oleh daerahnya melalui PAD harusnya lebih banyak dialokasikan pada anggaran belanja daerah dalam bidang fasilitas maupun infrastruktur publik dan kebutuhan pemerintah yang lebih produktif[14]. Pada kenyataannya pendapatan daerah tersebut seringkali digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kurang menunjang pertumbuhan ekonomin yang kurang produktif[15]. Pada pemaparan teori pilihan rasional di atas, merupakan teori yang cukup tepat untuk keadaan penganggaran pada Pemkab Brebes pada masa pandemi seperti sekarang. Dimana Pemerintah Kabupaten Brebes memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kemanfaatan atau yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Brebes dengan kata lain meminimalisir biaya.

PAD merupakan penerimaan pemungutan berdasarkan Peraturan Daerah dari berbagai sumber dalam wilayahnya sendiri[16]. Selanjutnya bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain merupakan PAD[17]. Unsur PAD sebagai berikut :

1. Retribusi Daerah

Ada dua pungutan untuk kabupaten/kota, antara lain: retribusi kabupaten/kota ditetapkan sesuai kewenangan daerah masing-masing, pungutan untuk kabupaten/kota ditentukan sesuai dengan layanan yang diberikan oleh masing-masing daerah.

2. Pajak Daerah

Jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota meliputi: pajak hotel, pajak restoran/restoran, pajak hiburan, pajak iklan, pajak penerangan jalan, pajak atas ekstraksi mineral kelas c, dan pajak parkir

3. Dana badan usaha milik daerah dan dana pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

Jenis-jenis penghasilan tersebut antara lain obyek penghasilan, diantaranya: bagian keuntungan untuk perusahaan milik lokal, divisi lembaga keuangan bank, bagian keuntungan dari lembaga keuangan non bank, dan bagian laba atas ekuitas/investasi[18].

4. Pendapatan Asli Daerah Sah Lainnya

Jenis-jenis penghasilan tersebut antara lain obyek penghasilan, antara lain: hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan akun saat ini, penerimaan bunga deposito, denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan kompensasi kerugian/kerugian aset daerah[19].

PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian belanja modal pada penelitian[20]. Hasil penelitian Mawarni, dkk. dan Ni Luh Dina, dkk. sependapat dengan

Darwanto & Yulia bahwa terdapat pengaruh yang positif signifikan antara PAD terhadap belanja modal [21], [22]. Otonomi daerah yang dilaksanakan dengan baik dapat dilihat dari pendapatan asli daerah yang tinggi.

PAD adalah semua penerimaan kas daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah [23]. Dalam penelitian sebelumnya pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal [24]. Dalam temuan ini, besaran PAD dapat diindikasikan menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal [25]. Untuk setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan PAD yang diterima [26]. Pemerintah daerah harus mengupayakan PAD semaksimal mungkin [21]. Menurut Akbar PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal [22]. PAD berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan alokasi belanja modal. Semakin besar PAD yang diterima maka akan meningkatkan alokasi belanja modal daerah [26]. Semakin besar pendapatan asli daerah akan membuat belanja daerah juga meningkat dan akan lebih banyak pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat [27]. Dari penelitian yang dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal [28].

Rencana, anggaran mengutamakan pembangunan, berpihak pada publik, dan kekuatan pengambilan keputusan, yang dilaksanakan dalam satu periode fiskal [29]. Anggaran tersebut masih dalam bentuk rencana, sehingga tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada perbedaan dengan kenyataan di lapangan pada saat anggaran dilaksanakan, sehingga penganggaran tidak selesai pada saat mencapai ketentuannya [30]. Revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan anggaran untuk bereaksi terhadap kondisi lingkungan sekitar dan kebijakan pemerintah, serta meningkatkan kinerja anggaran [31]. Pada tahun target anggaran saat ini dengan yang direncanakan dan ditentukan di lapangan ternyata berbeda selama anggaran ditetapkan, hal inilah yang mendasari perubahan penganggaran yang disebut revisi pada tahun anggaran [32]. Penyebab perubahan APBD ada beberapa faktor, yaitu karena perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan anggaran berupa terlampauinya proyeksi pendapatan daerah atau tidak melaksanakan alokasi belanja daerah serta sumber dan penggunaan pembiayaan yang berbeda dengan yang telah ditentukan [33]. Terdapat faktor penting lain yang terkait dengan perubahan alokasi belanja, yaitu perubahan anggaran tahun lalu karena penetapan revisi anggaran tahun berjalan mengikuti pola yang telah berjalan sebelumnya [34].

Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai pemerintah daerah yang memiliki kewenangan besar dengan adanya desentralisasi diharapkan mampu melihat dan mengidentifikasi semua sektor ekonomi unggulan dan mampu mendorong berbagai sektor ekonomi sehingga dapat berdampak pada peningkatan kapasitas daerah [35]. Selain melihat sektor ekonomi yang ada, pemerintah daerah juga diharapkan dapat meningkatkan PAD, sehingga akan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuka sektor ekonomi baru dengan melihat potensi pada masing-masing wilayah. Dengan adanya berbagai sumber pendapatan asli daerah dari sumber-sumber baru tersebut diharapkan kemandirian semakin meningkat sehingga pada akhirnya pemerintah daerah tidak lagi bergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk membiayai anggaran rumah tangganya.

Dasar kesadaran tersebut, maka perhatian yang besar dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk dapat meningkatkan faktor kapasitas daerah dalam pembiayaan APBD itu sendiri perlu ditingkatkan guna mengurangi proporsi dana transfer pemerintah pusat di total. Pendapatan daerah, yang merupakan salah satu ukuran tingkat kemandirian suatu daerah. Belanja yang bertujuan untuk membuat anggaran yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan disebut belanja langsung. Kualifikasi belanja langsung dibagi menurut jenis pembelanjannya, yaitu: belanja pegawai yang ditujukan untuk belanja upah dalam melaksanakan

program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, belanja barang dan jasa, belanja modal[36].

Anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk sarana umum[37]. Setiap tahun, dampak finansial jangka panjang adalah pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik. Belanja modal adalah belanja yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan [38]. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. APBD menjadi tolak ukur keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya, dampak positif peningkatan PAD ditandai dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah. APBD, adalah rencana keuangan pemerintah daerah tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 menyatakan bahwa belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Demikian pula belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang menambah aktiva tetap atau aktiva lain yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang mempertahankan atau menambah masa manfaat, menambah kapasitas dan kualitas aset. Dalam APBN, selain anggaran penerimaan juga terdapat anggaran belanja yang dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu, pengeluaran rutin, belanja pembangunan[39]. Belanja rutin adalah belanja yang ditujukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan sehari-hari[40]. Padahal biaya rutin dapat dibagi menjadi biaya operasional dan biaya konsumsi[41]. Pengeluaran rutin secara rinci dapat dikelompokkan menjadi beberapa unsur, yaitu: belanja karyawan, belanja barang, subsidi daerah otonom, angsuran bunga / hutang, biaya rutin lainnya[42]

Tabel 1. Dimensi Variabel

Dimensi/ Variabel	Sub Dimensi	Indikator
Anggaran Publik	a. Sistem penganggaran	1) Anggaran tradisional atau anggaran konvensional
		2) Pendekatan new publik management
	b. Teknik penganggaran	3) Anggaran kinerja (performance budgeting)
		4) Zero Based Budgeting (ZBB)
		5) Planing, Programming, and Budgeting System (PPBS)
Belanja Langsung	c. Konsep pengelolaan keuangan	1) Bidang sosial
		2) Aspek sosial ideologi, aspek sosial politik, aspek sosial ekonomi, aspek sosial budaya, aspek sosial keamanan
	d. Klasifikasi pembelanjaan	3) Belanja penyelenggaraan pemerintah pusat
		4) Belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja lain-lain, dan transfer daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Riset ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif digunakan sebagai metode yang menggunakan objek meneliti alamiah. Peneliti menjadi instrumen kunci dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan yang analisis datanya bersifat induktif. Hasil penelitian kualitatif yang didapat menekankan pada pemahaman makna[43]. Objek dalam riset ini adalah pegawai Kantor BPPKAD Kabupaten Brebes pada masa pandemi covid-19. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah penerapan model Miles and Huberman Dengan

model Miles dan Huberman sebagai alat analisis data, tahap analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses meringkas, memilih hal-hal utama, memfokuskan pada hal-hal penting sesuai tema dan menghilangkan hal-hal yang tidak perlu. Penyajian data meliputi deskripsi data berupa uraian singkat atau narasi, bagan, dan hubungan antar kategori, menginterpretasikan fakta, gejala dan kejadian yang telah diamati dan dipastikan selama proses pengumpulan data di lapangan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan tentang apa yang telah dipahami [44]. Sumber data yang diperoleh dari riset ini merupakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan aparatur daerah dan lokasi objek penelitian di Kabupaten Brebes. Objek penelitian meliputi Kantor BPPKAD Kabupaten Brebes pada bidang keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengambilan data dengan metode wawancara pada hari Rabu, 20 Maret 2019 di kantor BPPKAD Kabupaten Brebes pada bidang anggaran. Bersama Bapak Khoerul Umam terkait keuangan yang ada di Pemkab Brebes, gambaran umum PAD pada saat pandemi mengalami penurunan semula Rp 398.649.681.000 turun menjadi Rp 363.130.149.000. PAD antara lain pajak daerah turun 10%, retribusi daerah turun 20%, dan PAD lain-lain yang sah turun 20%. Sementara untuk belanja daerah, juga mengalami penurunan, yakni semula Rp 3.270.994.179.000 berkurang 4,43% menjadi Rp 3.125.981.682.000.

Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 1.824.932.368.000, dan belanja langsung sebesar Rp 1.301.049.314.000. Belanja langsung tersebut terdiri dari Belanja Pegawai semula Rp 63.989.734.000 naik 27,42% menjadi Rp 81.538.546.000. Kemudian, Belanja Barang dan Jasa semula Rp 801.121.247.000 berkurang 4,8% menjadi Rp 762.525.653.000. Sedangkan belanja modal berkurang dari Rp 536.441.460.000 menjadi Rp 456.985.115.000.

Pada belanja langsung terkhusus pada belanja pegawai untuk kondisi anggaran belanja pegawai pada dasarnya tetap sama dengan sebelum pandemi, hanya terdapat pembeda antaranya terkait honor kegiatan dipotong sampai sekarang, gaji dan tunjangan pendapatan tetap sama. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, Pemkab Brebes condong untuk mengintensifkan tenaga kesehatan yaitu yang telah diatur pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK.01.07/MENKES/327/2020 tentang penetapan corona virus disease 2019 (covid-19) akibat kerja sebagai penyakit akibat kerja yang spesifik pada pekerjaan tertentu. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298. Cara penyusunan dan penyaluran PAD diantaranya pada perubahan Bupati tentang APBD diatur pada Pergub diubah dengan otomatis target pendapatan berubah sama dengan alokasi belanja langsung berubah di Pergub APBD tersebut. Penyaluran tidak ada perubahan sebelum maupun sesudah pandemi, prosedur tidak berubah. Dalam hal ini konsep pengelolaan keuangan Pemkab Brebes pada bidang anggaran dengan menganut konsep berimbang, dimana ketika terdapat defisit pembiayaan menjadi penutupnya. Ketika belanja lebih besar dari pendapatan, akan secara otomatis ditutup pdengan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari periode yang sebelumnya.

Pada masa pandemi seperti sekarang lebih memprioritaskan untuk penanganan covid-19 dari sisi bidang kesehatan, pemulihan ekonomi, dan bansos untuk masyarakat yang terdampak covid-19. Untuk penerapan pendekatan sistem penganggaran Pemkab Brebes pada masa pandemi condong untuk mengakomodir kebutuhan covid-19 dan adanya pengurangan anggaran atau pengeluaran pendapatan belanja perubahan, pada surat perubahan APBD adanya aturan yang membatasi yaitu pada UU No 1 tentang penanganan covid-19 semua bebas dapat digeser atau dialihkan pada hal-hal yang lebih diprioritaskan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang dilakukan pada kantor BPPKAD Kabupaten Brebes bahwa PAD pada saat pandemi mengalami penurunan semula Rp 398.649.681.000 turun menjadi Rp 363.130.149.000. PAD antara lain pajak daerah turun 10%, retribusi daerah turun 20%, dan PAD lain-lain yang sah turun 20%. Sementara untuk belanja daerah, juga mengalami penurunan, yakni semula Rp 3.270.994.179.000 berkurang 4,43% menjadi Rp 3.125.981.682.000. Konsep Pemda Kabupaten Brebes dengan menggunakan konsep perimbangan dimana dana pembiayaan menjadi penutup. Adanya perubahan anggaran belanja langsung yaitu menjadikan belanja langsung mengalami penurunan sekitar 35%. Anggaran diprioritaskan untuk penanganan covid-19 dimana untuk pembiayaan intensif tenaga kesehatan dan bantuan terhadap masyarakat yang mengalami dampak covid-19. Adanya SKPD yang dikurangi untuk anggarannya dan ada yang ditambah seperti dinas kesehatan karena sebagai prioritas untuk penanganan covid-19. Hal ini berkaitan dengan belanja penyelenggaraan pemerintah dimana Pemda Kabupaten Brebes menyalurkan bantuan sosial melalui PPKD Namun, pada dasarnya pembagian operasional bansos anggaran berada di tangan dinas sosial.

DAFTAR REFRENSI

- [1] N. Devi Ade Yulian Roby Setiadi, Khalid Iskandar, Mohammad Badrun Zaman, "Pengaruh CAR, NPL, ROA, ROE, dan LDR terhadap Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Kasus pada Bank BPR di Wilayah Brebes Periode Tahun 2014-2018)," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 106–119, 2019.
- [2] R. R. Umamatul Khoeriyah Syariefful Ikhwan, Roby Setiadi, Mohammad Badrun Zaman, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan (Studi pada Bank Umum Go Public Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 81–94, 2019.
- [3] N. Khoeriyah, A. Indriyani, I. D. Mulyani, N. Aisyah, dan A. Yulianto, "Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan," *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 83–91, 2019.
- [4] N. Setiawati Azizah Indriyani, Amelia Sholeha, Ely Supratin, "Pengaruh Rasio Lancar, Margin Laba Bersih Dan Tingkat Pengembalian Asset Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Index Lq45 Periode 2012-2016)," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 49–59, 2019.
- [5] M. Ayusa Nitasari Andi Yulianto, Amelia Sholeha, Afti Sulastri, "Pengaruh Tuntutan Pendidikan, Pemahaman Akuntansi dan Ukuran Usaha terhadap Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP (Studi Empiris pada UMKM di Wilayah Kab. Brebes)," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 25–37, 2019.
- [6] N. Firdausa Nuzula Indah Dewi Mulyani, Dumadi, Nur Afridah, "Analisis Pengaruh Debt To Equity Ratio (DER), Laba dan Ukuran Perusahaan terhadap Return Saham pada Perusahaan LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 60–67, 2019.
- [7] A. Saripin, A. Indriyani, A. S. Kharisma, S. Musdalifah, dan H. K. Wulandari, "Analisis Volume Penjualan, Biaya Operasional dan Harga Kamar terhadap Laba Bersih (Studi Empiris pada Grand Dian Hotel Brebes Tahun 2017 – 2018)," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 15–24, 2019.
- [8] R. R. Rais Puji Rahayu Andi Yulianto, Titi Rahmawati, Slamet Bambang Riono, "Analisis Pelaksanaan Sistem Akuntansi pada APBDes Pemerintah Desa di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 38–48, 2019.
- [9] M. Tuti Alawiyah Andi Yulianto, Anisa Sains Kharisma, Yenny Ernitawati, "Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk Pembangunan di Kabupaten Brebes Tahun 2008-2017 (Studi Empiris pada BPPKAD Kabupaten Brebes)," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 71–80, 2019.

- [10] S. I. Lili Nur Intan Findhy Dwita Kumala, Roni, Dumadi, “Analisis Kelayakan Usaha Pengolahan Arum Manis UKM Dio di Desa Tegalreja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 95–105, 2019.
- [11] Y. E. Erika Oktavia Azizah Indriyani, Titi Rahmawati, Anggi Ayu Saputra, “Pengaruh Biaya Produksi dan Penjualan terhadap Laba Bersih pada Rocket Chicken Brebes,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 1–14, 2019.
- [12] R. Evatul Djannah Maftukhin, Dwi Harini, Indah Dewi Mulyani, “Analisis Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) terhadap Harga Saham,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, hal. 25–32, 2019.
- [13] H. K. W. Azizah Anisa Sains Kharisma, Indah Dewi Mulyani, Nur Afridah, “Faktor-Faktor Fundamental yang Mempengaruhi Harga Saham (Study Empiris pada Perusahaan Manufaktur),” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, hal. 53–63, 2019.
- [14] H. K. W. Ahmad Faozan Heru Subagja, Andi Yulianto, Slamet Bambang Riono, “Pengaruh Biaya Promosi dan Harga Jual terhadap Volume Penjualan pada Yamaha Agung Motor Brebes,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, hal. 74–84, 2019.
- [15] Y. E. Irna Roseniati Roni, Muhammad Badrun Zaman, Titi Rahmawati, “Mengukur Kinerja Keuangan PT BNI (Persero) Tbk dengan Menggunakan Rasio Keuangan,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, hal. 96–110, 2019.
- [16] U. Ubaedillah dan R. Hartono, “English Education Journal Physical and Psycho-Social Environments Strategies in Managing English Classes for Young Learners,” *English Educ. J.*, vol. 6, no. 2, hal. 52–68, 2016,
- [17] A. Y. Sholikhha Puji Astuti Dumadi, Amelia Sholehah, Maftukhin, “Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Jangka Waktu terhadap Kredit Macet (Studi Kasus pada Koperasi Syariah Masyarakat Kertasindustri),” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, hal. 45–52, 2019.
- [18] B. Adjar Pranoto, “Integration of Toefl Listening Ability of Non-English Students At Universitas Muhadi Setiabudi,” *Adjar Pranoto Dialekt. J. PBI*, vol. 7, no. 2, hal. 170–185, 2019.
- [19] M. Dewi Ningsih Indah Dewi Mulyani, Ayusa Nitasari, Amelia Sholeha, “Pengaruh Turnover dan Inventory Turnover Terhadap Perubahan Laba pada Perusahaan Pertambangan,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, hal. 1–16, 2019.
- [20] A. S. K. Ririn Widia Astuti Roni, Dumadi, Nasiruddin, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, hal. 85–95, 2019.
- [21] M. Veronika Hutapea Hilda Kumala Wulandari, Roni, Anisa Sains Kharisma, “Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Dana Desa dan Ketaatan Peraturan Perundang-undangan terhadap Kualitas Kinerja Bendahara Desa,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, hal. 33–44, 2019.
- [22] H. K. W. Aldi Prayoga Anisa Sains Kharisma, Yenny Ernitawati, Nasiruddin, “Pengaruh Biaya Produksi dan Biaya Penjualan dalam Meningkatkan Laba Bersih,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, hal. 17–24, 2019.
- [23] S. B. Riono dan W. Wibowo, “Upaya Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Se-Kabupaten Brebes,” *Syntax Lit.*, vol. 4, no. 5, hal. 92–98, 2019,
- [24] S. Ikhwan dan B. S. Nugroho, “Identifikasi Dampak Pembangunan Jalan Tol Pejagalan-Brebes Timur terhadap Pemasaran Telur Asin di Jalan Pantura Brebes (Studi Kasus Umkm Telur Asin Kabupaten Brebes),” vol. 12, no. 1, hal. 15–28, 2019.
- [25] T. R. Muhammad Kuntoro Dwi Harini, Muhammad Badrun Zaman, Amelia Sholeha, “Peralihan Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Infrastruktur di Desa Kecipir, Kabupaten Brebes,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, hal. 64–73, 2019.
- [26] P. I. S. dan M. F. Titi Rahmawati, “Analisis Instrumen Parameter Partnership Pdam Tirta Satria Pada Program Saluran Rakyat Masyarakat Berpenghasilan,” *Syntax Idea*, vol. 1, no. 6, hal. 135–147, 2019.
- [27] Murdiono, M. Syaifulloh, R. Setiadi, Roni, dan S. Ikhwan, “Pengaruh Marketing Mix,

- Kualitas Pelayanan dan Citra Merk terhadap Keputusan Pembelian Produk Piston,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 72–82, 2019.
- [28] Dumadi, “Analisis Iklan, Brand Image, Harga, Kualitas Layanan, Kepuasan Pelanggan Meningkatkan Tingkat Hunian (Studi Kasus Hotel Grand Dian Brebes),” *Syntax Idea*, vol. 1, no. 7, hal. 1–33, 2019.
- [29] L. Istifana, Muhammad, A. N. P. Syaifulloh, H. Sucipto, dan S. Ikhwan, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Pelanggan di Toko Mebel Sinar Jaya, Losari, Brebes,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 3–40, 2019.
- [30] N. Fadlilah, S. B. Riono, D. Harini, A. Yulianto, dan Mukson, “Studi Kausal Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 66–71, 2019.
- [31] N. Kiman, M. Syaifulloh, A. N. D. Wahana, G. Fitralisma, dan S. B. Riono, “Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen pada Depot Air Minum Isi Ulang UD Enzes Pengabean,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 92–101, 2019.
- [32] T. Alfina, A. Kristiana, I. D. Mulyani, K. Iskandar, dan A. Indriyani, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada PO Dedy Jaya Brebes Tahun 2016–2018),” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 23–32, 2019.
- [33] L. Ulfa, A. Yulianto, G. F. Dwi Harini, dan S. Ikhwan, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Disiplin Kerja, Budaya organisasi dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan PD BKK Brebes,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 41–52, 2019.
- [34] S. Abdullah, Y. Kusyanti, dan Nadirsyah, “Perubahan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah,” *J. Ekon. dan Pembang.*, vol. 11, no. 1, hal. 26–48, 2020.
- [35] Diantoro, A. N. PDW, A. Kristiana, K. Iskandar, dan S. Ikhwan, “Analisis Pengaruh Kompensasi, Motivasi dan Komitmen Affective terhadap Kinerja Karyawan (Studi Empiris di PT Nagamas Surya Kencana Tegal),” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 14–22, 2019.
- [36] J. Hikmah, M. Syaifulloh, N. Khojin, N. Aisyah, dan S. B. Riono, “Pengaruh Faktor Kompetensi Individu, Faktor Dukungan Organisasi, Faktor Dukungan Manajemen terhadap Kinerja Pegawai,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 53–65, 2019.
- [37] D. Yoga, A. Indriyani, R. Setiadi, N. Khojin, dan A. Yulianto, “Pengaruh Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Pusat Statistik (BPS) Brebes,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 1–13, 2019.
- [38] A. Eksandy, M. Z. Hakim, dan Ekawati, “Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015),” no. 2009, hal. 85–94, 2015.
- [39] H. Nupus, R. Setiadi, dan H. Soesanto, “The Effect of Social Capital on The Product Innovativeness and Marketing Performance In Indonesian Furniture Small and Medium-Sized Enterprises,” *Int. Rev. Manag. Mark.*, vol. 6, no. 7SpecialIssue, hal. 355–360, 2016.
- [40] R. Setiadi, K. L. Batu, dan H. Soesanto, “Does an Environmental Marketing Strategy Influence Marketing and Financial Performance? A Study of Indonesian Exporting Firms,” *Market-Trziste*, vol. 29, no. 2, hal. 177–192, 2017, doi: 10.22598/mt/2017.29.2.177.
- [41] H. Soesanto dan R. Setiadi, “Social Capital Dimensions in SMES Manufacturing Firms in Central Java: Do They Matter?,” *Int. J. Civ. Eng. Technol.*, vol. 8, no. 11, hal. 1059–1069, 2017.
- [42] R. Setiadi, E. Herlinas, B. B. Priharto, W. Pertiwi, B. B. Priharto, dan M. Djadjuli, “Adaptive Management Strategies on Advances of Information Technology: A Study of the Importance of Social Media Marketing and Customer Database,” *Int. J. Civ. Eng. Technol.*, vol. 8, no. 11, hal. 1050–1058, 2017.
- [43] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. 2021.
- [44] S. Sopian, “Standarisasi Kompetensi Ahli Akuntansi Sektor Publik,” *J. Appl. Manag. Account.*, vol. 4, no. 1, hal. 110–121, 2020, doi: 10.30871/jama.v4i1.1953.